

PROSIDING

Talkshow Festival Pesona 3 Kepemimpinan Perempuan Perhutanan Sosial Mengawal Masa Depan Hutan Lestari



21

Agustus 2025

Ruang Rimbawan 2,
Manggala Wanabakti, Kemenhut RI

**PROSIDING TALKSHOW
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERHUTANAN SOSIAL
MENGAWAL MASA DEPAN HUTAN LESTARI**

Jakarta, 21 Agustus 2025

Kerjasama:

**Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI
dan**

**Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM)/
Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia (YKMI)**

Di dukung oleh :

The Asia Foundation (TAF)

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang terus mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta dengan izinNya sehingga Talkshow dengan tema **“Kepemimpinan Perempuan Perhutanan Sosial Mengawal Masa Depan Hutan Lestari”**, dapat terlaksana dengan baik dan Prosiding ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Kegiatan Talkshow ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI dengan FKKM dan pendanaan dari The Asia Foundation yang bertujuan untuk menegaskan pentingnya kepemimpinan perempuan sebagai garda depan dalam menjaga kelestarian hutan dan memastikan keberlanjutan tata kelola sumber daya alam. Dalam konteks ini, forum menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman lapangan, serta merumuskan strategi bersama guna memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya hadir sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mewujudkan hutan lestari, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial-ekologis.

Prosiding ini memuat ringkasan pembahasan dari kegiatan *talkshow* tentang kepemimpinan perempuan di Perhutanan Sosial dalam mengawal masa depan hutan lestari yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Nurhalimah (Penggagas perempuan penjaga hutan adat di Kabupaten Pidie, Aceh), Pitriwati (Perwakilan KUPS perempuan di Desa Tanjung Agung Sumatera Selatan), Eliya (Ketua LPHD Malasari Halimun Sejahtera, Desa Malasari, Kabupaten Bogor), Hasmah (KUPS Kopi Baredok, Desa Buntu Mondong, Kabupaten Enrekang), dan Noviana (Ketua KUPS Femung Himet, Desa Long Sam, Kalimantan Utara) sebagai narasumber yang telah bersedia berbagi pengalaman yang sangat berharga sebagai pemimpin perempuan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Catur Endah Prasetyani (Direktur PUPS Ditjen PS), Nur Amalia (TP3PS) dan Soni Trison (Ketua Departemen Manajemen Hutan IPB) yang telah memberi tanggapan dan saran yang bermakna dalam mengelola kelembagaan dan usaha Perhutanan Sosial.

Prosiding ini diharapkan menjadi inspirasi, sumber ide, dan rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta masyarakat luas dalam memperkuat peran dan kepemimpinan perempuan dalam perhutanan sosial. Kepemimpinan perempuan bukan hanya kunci keberlanjutan ekologi, tetapi juga pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, peserta, dan mitra yang berasal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dunia usaha, lembaga donor, dan komunitas masyarakat yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam memperkuat agenda kepemimpinan perempuan di perhutanan sosial. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai setiap langkah, rencana, dan upaya kita bersama dalam mengawal masa depan hutan lestari dan kehidupan yang berkeadilan bagi generasi mendatang.

Bogor, Agustus 2025
Direktur Eksekutif YKMI / Seknas FKKM

Mangarah Silalahi, S.Sos. M.Sc., MT.

PROSIDING

TALKSHOW KEPEMIMPINAN PEREMPUAN PERHUTANAN SOSIAL MENGAWAL MASA DEPAN HUTAN LESTARI

Ruang Rimbawan 2, Gedung Manggala Wanabakti, 21 Agustus 2025

Penasehat:

Mangarah Silalahi S.Sos., MSc. MT.

Penanggungjawab:

Jomi Suhendri S.H., M.H.

Tim Penyusun Prosiding:

Ahmad Salman Al Farizy, B.BA.

Ginna Soniya Permata Hati, S.P.

Samdhana Achmal Saidi, S.Tr.E.

Editor Teknis dan Layout:

Onma Nafamora Hutabarat, S.Tr.I.Kom

Riska Agustina Afilla, S.Hut.

Desain Sampul:

Ginna Soniya Permata Hati

Diterbitkan oleh:

FKKM/YKMI @2025

Perum Bogor Baru Taman, Jalan Ciujung B8 No 8, RT.03/RW.08, Tegal Gundil - Bogor Utara,
Bogor, 16152

Email: info.fkkm@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN.....	2
1.3. KELUARAN	2
1.4. METODE DAN PROSES PENYELENGGARAAN TALKSHOW	2
1.5. PESERTA WORKSHOP	3
1.6. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN TALKSHOW	3
BAB 2 PEMBAHASAN TALKSHOW.....	4
2.1. SESI TALKSHOW	4
2.1.1. Pengantar dari Moderator (Swary Utami Dewi)	4
2.1.2. Narasumber I oleh Ketua LPHD Mahara Bogor (Ibu Eliya).....	5
2.1.3. Narasumber II oleh KUPS Kopi Baredok, Gapoktanhut Bubun Bila Buntu Marombong, Enrekang, Sulawesi Selatan (Hasmah).....	5
2.1.4. Narasumber III oleh Ketua KUPS Femung Himet, Desa Long Sam, Bulungan, Kalimantan Utara (Noviana Liling)	6
2.1.5. Narasumber IV oleh KUPS Perempuan Muara Jaya, Desa Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan (Pitriwati).....	7
2.1.6. Narasumber V oleh Penggagas Perempuan Penjaga Hutan Adat, Mukim Kunyet, Kabupaten Padie, Aceh (Nurhalimah)	9
2.2. PENYAMPAIAN PENDAPAT OLEH PENANGGAP	10
2.2.1. Penanggap I oleh Catur Endah Prasetyani (Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial).....	10
2.2.2. Penanggap II oleh Ketua Departemen Manajemen Hutan IPB University (Soni Trison)	11
2.2.3. Penanggap III oleh Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Nur Amalia)	12
2.3. SESI TANYA-JAWAB	13
2.3.1. Aldi Hidayah	13
2.3.2. Nuan	14
2.3.3. Siti	15
2.3.4. Harapan dari Narasumber.....	15
BAB 3 KESIMPULAN DAN PENUTUP	17

3.1.	KESIMPULAN	17
3.1.1.	Peran Perempuan.....	17
3.1.2.	Tantangan Utama	17
3.1.3.	Dukungan & Pendampingan	17
3.1.4.	Cerita Keberhasilan	17
3.1.5.	Pembelajaran Kunci	17
3.2.	PENUTUP.....	18
LAMPIRAN		20
LAMPIRAN 1	DOKUMENTASI TALKSHOW.....	20
LAMPIRAN 2	DAFTAR HADIR TALKSHOW	21
LAMPIRAN 3	TAYANGAN ULANG TALKSHOW.....	21
LAMPIRAN 4	PUBLIKASI MEDIA.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pengantar dari Moderator oleh Swary Utami Dewi	4
Gambar 2.2. Narasumber I oleh Ketua LPHD Mahara Bogor	5
Gambar 2.3. Narasumber II oleh KUPS Kopi Baredok, Gapoktanhut Bubun Bila, Buntu Marombong, Enrekang, Sulawesi Selatan (Hasmah)	6
Gambar 2.4. Narasumber III oleh Ketua KUPS Femung Himet, Desa Long Sam, Bulungan, Kalimantan Utara (Noviana Liling)	7
Gambar 2.5. Narasumber IV KUPS Perempuan Muara Jaya, Desa Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan (Pitriwati)	8
Gambar 2.6. Narasumber V Penggagas Perempuan Penjaga Hutan Adat, Mukim Kunyet, Kabupaten Padie, Aceh (Nurhalimah)	10
Gambar 2.7. Tanggapan oleh Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Catur Endah Prasetyani)	11
Gambar 2.8. Tanggapan oleh Ketua Departemen Manajemen Hutan IPB University (Soni Trison)	12
Gambar 2.9. Tanggapan oleh Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Nur Amalia)	13
Gambar 2.10. Tanya Jawab bersama Peserta (Aldi Hidayah)	14
Gambar 2.11. Tanya Jawab bersama Peserta (Nuan)	14
Gambar 2.12. Tanya Jawab bersama Peserta (Siti)	15

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perhutanan Sosial (PS) merupakan skema pengelolaan hutan oleh masyarakat yang memberikan akses legal untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat tata kelola hutan berbasis komunitas. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, capaian PS telah mencapai lebih dari 8,3 juta hektar melalui berbagai skema, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat (KLHK 2024). Di balik capaian tersebut, keterlibatan perempuan sebagai aktor kunci dalam menjaga hutan dan mengelola sumber daya alam masih menghadapi tantangan struktural maupun kultural.

Perempuan memiliki peran penting dalam PS, baik sebagai penjaga pengetahuan tradisional, pengelola hasil hutan bukan kayu, maupun penopang ekonomi rumah tangga. Studi menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, hasilnya lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (Agarwal 2010; UN Women 2021). Namun, kepemimpinan perempuan dalam tata kelola PS seringkali belum mendapat ruang optimal akibat minimnya pengakuan formal, keterbatasan kapasitas, serta kurangnya dukungan kebijakan yang responsif gender (HuMa 2022).

Selain itu, kendala finansial turut memperlemah dukungan bagi kepemimpinan perempuan. Kebijakan efisiensi anggaran nasional melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 telah menyebabkan penurunan signifikan anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari Rp 1,217 triliun menjadi Rp 3,941 triliun defisit (Bappenas 2025). Kondisi ini berdampak pada terbatasnya fasilitasi pendampingan pasca penetapan PS, termasuk program penguatan kapasitas perempuan di tingkat tapak.

Di sisi lain, banyak praktik baik menunjukkan keberhasilan perempuan memimpin inisiatif PS. Misalnya, kelompok perempuan pengelola madu hutan di Jambi yang berhasil meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan sekaligus menjaga ekosistem rawa gambut (Kehati 2023), atau komunitas perempuan di Sulawesi Tengah yang mengembangkan ekowisata berbasis hutan desa untuk meningkatkan pendapatan sekaligus melestarikan satwa liar (Yayasan Bentala 2022). Praktik-praktik tersebut membuktikan bahwa ketika perempuan diberi ruang kepemimpinan, mereka mampu menjadi penggerak inovasi sosial dan ekonomi hijau.

Namun, untuk memperluas dampak positif tersebut, diperlukan ekosistem pendukung yang kuat. Hal ini mencakup penyediaan pendanaan berkelanjutan, penguatan kapasitas organisasi perempuan, serta pembentukan jaringan pembelajaran antar komunitas perempuan PS di berbagai daerah. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, CSO, akademisi, donor nasional/internasional, dunia usaha, dan masyarakat hukum adat/lokal menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan perempuan di PS (FKKM 2023).

Dalam konteks ini, talkshow “Kepemimpinan Perempuan Perhutanan Sosial Mengawal Masa Depan Hutan Lestari” hadir sebagai ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta merumuskan strategi bersama. Tujuannya adalah memperkuat peran dan kepemimpinan perempuan tidak hanya

sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai pengambil keputusan, inovator, dan penjaga ekologi untuk memastikan keberlanjutan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tujuan

1. Mendapatkan inspirasi dari para pemimpin perempuan PS dalam menjaga kelestarian hutan dan memastikan keberlanjutan tata kelola sumber daya alam
2. Memperkuat peran kepemimpinan perempuan sebagai pengambil keputusan, inovator, dan penjaga ekologi untuk memastikan keberlanjutan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Keluaran

Terdokumentasikannya peran perempuan dalam perhutanan sosial melalui event talkshow, platform youtube, dan prosiding.

1.4. Metode dan Proses Penyelenggaraan Talkshow

Pelaksanaan kegiatan talkshow ini bersifat terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, organisasi perempuan, NGO/CSO, dan LSM. Metode kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi dari narasumber dan diskusi. Dalam proses diskusi, diharapkan setiap peserta dapat memberikan tanggapan dan masukan konstruktif terkait penguatan kapasitas, ruang partisipasi, serta kolaborasi multipihak dalam mendukung kepemimpinan perempuan yang inklusif dan berkelanjutan. Workshop ini juga menjadi ruang strategis untuk mengidentifikasi peluang dukungan dari donor, lembaga filantropi, dunia usaha, dan pemerintah dalam memperkuat peran perempuan sebagai penggerak utama pengelolaan hutan lestari. Penyelenggaraan talkshow ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) dan mitra terkait yang memiliki perhatian terhadap pengarusutamaan gender dan perhutanan sosial, melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahap persiapan penyelenggaraan talkshow ini meliputi:
 - a. Penyusunan materi tentang kepemimpinan perempuan dalam perhutanan sosial yang akan disampaikan kepada peserta.
 - b. Penyusunan konsep teknis kegiatan workshop yang responsif gender.
 - c. Pembuatan susunan acara talkshow.
 - d. Penetapan narasumber dan peserta talkshow dengan keterwakilan perempuan dan multipihak.
 - e. Persiapan tempat dan waktu penyelenggaraan talkshow.
 - f. Persiapan peralatan pendukung, seperti spanduk, kamera dokumentasi, serta handout materi.
2. Tahap Pelaksanaan Talkshow

Tahap pelaksanaan talkshow ini merupakan tahapan penyampaian materi oleh narasumber mengenai peran dan kepemimpinan perempuan dalam perhutanan sosial. Pada tahap ini, peserta workshop memberikan tanggapan dan masukan terkait penguatan kapasitas, ruang partisipasi, serta kolaborasi multipihak dalam mendukung kepemimpinan perempuan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, peserta juga mengidentifikasi peluang dukungan dari donor, lembaga filantropi, dunia usaha, dan pemerintah untuk memperkuat peran perempuan sebagai penggerak utama pengelolaan hutan lestari. Hasil dari talkshow ini kemudian dijadikan sebagai masukan

untuk penyusunan konsep laporan akhir dan rekomendasi kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan dalam perhutanan sosial.

1.5. Peserta Workshop

Peserta workshop ini dihadiri oleh 150 peserta secara *offline* dan sekitar 493 penayangan (live streaming youtube) yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat adat dan lokal, CSO/NGO, media, dan lainnya. Narasumber *talkshow* ini adalah sebagai berikut:

1. Nurhalimah (Penggagas Perempuan Penjaga Hutan Adat, Mukim Kunyet, Kabupaten Padie, Aceh)
2. Pitriwati (KUPS Perempuan Muara Jaya, Desa Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan)
3. Eliya (Ketua LPHD Malasari Halimun Sejahtera (Mahara), Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Bogor)
4. Hasmah (KUPS Kopi Baredok, Gapoktanhut Bubun Bila, Desa Buntu Mondong, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan)
5. Noviana (Ketua KUPS Femung Himet, Desa Long Sam, Bulungan, Kalimantan Utara)

Selain narasumber, adapun penanggap sebagai berikut:

1. Catur Endah Prasetyani (Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial)
2. Nur Amalia (Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial)
3. Soni Trison (Ketua Departemen Manajemen Hutan IPB)

1.6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan *Talkshow*

Talkshow berjudul “**Kepemimpinan Perempuan Perhutanan Sosial Mengawal Masa Depan Hutan Lestari**” ini dilaksanakan pada:

Hari,Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025

Pukul : 13.00 s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Rimbawan 2, Gedung Manggala Wanabakti, Kemenhut

BAB 2

PEMBAHASAN TALKSHOW

Sebelum *talkshow* dimulai, acara dibuka oleh MC dan dilanjutkan dengan pemutaran video tentang peran serta perempuan dari Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Maju Bersama. KPPL Maju Bersama mengelola kawasan Perhutanan Sosial (PS) seluas 10 ha di sekitar Taman Nasional Sebrat Kerinci, Provinsi Bengkulu melalui budidaya kecombrang dan pakis. Setelah pemutaran video, sesi *talkshow* bersama narasumber dilaksanakan yang dipandu oleh moderator Swary Utami Dewi dari TP3PS.

2.1. Sesi *Talkshow*

Acara talkshow dibuka oleh MC dengan pengenalan festival pesona yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Moderator. Tema talkshow adalah Kepemimpinan Perempuan Perhutanan Sosial Mengawal Masa Depan Hutan Lestari.

2.1.1. Pengantar dari Moderator (Swary Utami Dewi)

Moderator Swary Utami Dewi membuka sesi dengan menegaskan tema “Kepemimpinan Perempuan Perhutanan Sosial Mengawal Masa Depan Hutan Lestari.” Beliau menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia juga berarti kemerdekaan perempuan dalam memimpin dan mengelola hutan. Perempuan kini terbukti mampu menjaga kelestarian, mengelola hasil hutan, serta berkontribusi pada ekonomi masyarakat. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan strategi dalam memperkuat peran perempuan dalam perhutanan sosial.



Gambar 2.1. Pengantar dari Moderator oleh Swary Utami Dewi

2.1.2. Narasumber I oleh Ketua LPHD Mahara Bogor (Ibu Eliya)

Poin-poin:

Eliya, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Mahara, memaparkan perjalanan masyarakat dalam menjaga hutan yang sejak lama menjadi sumber kehidupan dan dikelola secara turun-temurun. LPHD Mahara lahir pasca peristiwa penebangan liar tahun 2003 yang mendorong kelompok ibu-ibu bergerak melakukan pelestarian. Pada tahun 2004, LPHD memperoleh pengakuan resmi melalui SK pemerintah, yang memberikan kepastian hukum dan mendorong pengelolaan hutan secara partisipatif, khususnya dengan melibatkan perempuan.

Dalam pengelolaan, masyarakat mengacu pada kearifan lokal Sunda: Leuweung Tutupan (hutan inti yang dilindungi), Leuweung Titipan (hutan yang hanya boleh ditanami pohon buah), dan Leuweung Awisan (hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai ladang atau sawah). Skema ini sejalan dengan prinsip zonasi modern. Saat ini, LPHD Mahara mengelola 399 hektare hutan, termasuk 74 hektare kawasan tutupan.

Selain aspek ekologis, nilai budaya juga dijaga melalui tradisi lisan dan nyanyian tentang hutan yang diturunkan sejak kecil. LPHD Mahara kemudian mengembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hasil hutan. Eliya menegaskan bahwa pengelolaan berbasis kearifan lokal bukan hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memperkuat budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.2. Narasumber I oleh Ketua LPHD Mahara Bogor

2.1.3. Narasumber II oleh KUPS Kopi Baredok, Gapoktanhut Bubun Bila Buntu Marombang, Enrekang, Sulawesi Selatan (Hasmah)

Poin-poin:

Hasma, perwakilan dari KUPS Kopi Baredok, Enrekang, menceritakan bahwa kopi telah lama menjadi sumber utama penghidupan masyarakatnya secara turun-temurun. Meski izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) baru diperoleh pada tahun 2021, praktik pengelolaan hutan sebagai kebun kopi sudah dilakukan sejak lama. Dalam keseharian, peran perempuan sebelumnya terbatas karena akses kebun yang sulit, sehingga mayoritas pengelolaan dilakukan oleh laki-laki. Titik balik terjadi pada Agustus 2024 ketika Hasma dipercaya menjadi bendahara kelompok. Dari situ, keterlibatan perempuan mulai meningkat dalam organisasi dan kegiatan usaha.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengubah pola pikir gender di masyarakat, karena banyak yang meragukan kemampuan perempuan dalam administrasi dan pengelolaan keuangan. Namun, melalui dukungan lembaga seperti The Asia Foundation (TAF), para perempuan mendapatkan pelatihan budidaya kopi, mulai dari pembibitan, pemanenan buah merah, hingga pengolahan, serta pelatihan pemasaran dan pengenalan dunia bisnis.

Kini, KUPS Kopi Baredok berhasil menghasilkan produk bernilai tambah berupa green bean, roast bean, dan bubuk kopi yang telah bersertifikat halal dan diperkenalkan di berbagai pameran. Produk ini dipasarkan langsung ke konsumen maupun melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan akademisi, termasuk Profesor Kopi dari Kawali. Transformasi besar terjadi dengan semakin aktifnya perempuan dalam rantai produksi—dari pemetikan, penjemuran, penyortiran, pengemasan, hingga pemasaran—serta keberanian mereka mengikuti rapat, diskusi, dan pengambilan keputusan.

Hasma menutup dengan ungkapan rasa syukur atas kesempatan pertamanya hadir dan berbicara di Jakarta, yang dianggap sebagai momen berharga sekaligus motivasi untuk terus memperkuat kiprah perempuan dalam pengelolaan hutan dan usaha kopi di masa depan.



Gambar 2.3. Narasumber II oleh KUPS Kopi Baredok, Gapoktanhut Bubun Bila, Buntu Marombong, Enrekang, Sulawesi Selatan (Hasmah)

2.1.4. Narasumber III oleh Ketua KUPS Femung Himet, Desa Long Sam, Bulungan, Kalimantan Utara (Noviana Liling)

Poin-poin:

Noviana Liling, Ketua KUPS Femung Himet dari Desa Long Sam, Kalimantan Utara, berbagi kisah tentang perjalanan kelompok perempuannya dalam mengelola hasil hutan dan usaha masyarakat. Sebelum aktif di kelompok, ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan kebun, tanpa pernah membayangkan akan memimpin kelompok perempuan di desanya. Perubahan dimulai pada tahun 2017 ketika desa mereka memperoleh izin Perhutanan Sosial dan terbentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Dari situ, pemberdayaan perempuan dimulai melalui berbagai pelatihan, hingga akhirnya pada April 2025 lahirlah KUPS Femung Himet—kelompok perempuan pertama di Kalimantan Utara—yang disahkan melalui SK KPH Bulungan. Nama Femung Himet berarti “pemikiran bersama,” mencerminkan semangat kebersamaan perempuan desa.

Produk utama kelompok ini adalah minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil/VCO) dan berbagai kerajinan rotan seperti anyaman. Walaupun masih baru, produk mereka telah memiliki izin PIRT dan tengah berproses memperoleh sertifikat halal. Produk-produk ini telah dipasarkan baik di Kalimantan maupun di Jakarta dengan dukungan berbagai pihak. Kelompok juga memperoleh bantuan peralatan produksi senilai Rp50 juta dari Dinas Kehutanan serta dukungan dari Pemerintah Desa berupa alokasi 5.000 bibit kelapa untuk mendukung keberlanjutan produksi VCO.

Namun, perjalanan tidaklah mudah. Banyak anggota masih terbagi kesibukannya, sehingga muncul keraguan untuk maju. Di awal berdiri, kelompok bahkan tidak memiliki anggaran, sehingga kegiatan dimulai secara swadaya dengan menyumbangkan kelapa dari anggota untuk diolah. Meski desa kaya akan kelapa, buah tersebut seringkali dibiarkan begitu saja dengan harga jual sangat rendah. Melalui pelatihan dan pendampingan, perempuan desa belajar mengolah kelapa agar memiliki nilai tambah.

Hingga kini, kelompok sudah mampu memasarkan sekitar 100 botol VCO, tetapi masih menghadapi keterbatasan karena produksi dilakukan di rumah produksi PKK yang tidak memenuhi standar BPOM. Hal ini menjadi kendala besar dalam mengembangkan usaha ke tahap berikutnya. Noviana menutup pemaparannya dengan harapan agar kelompoknya mendapatkan dukungan lebih lanjut, baik berupa fasilitas produksi, pendampingan, maupun penguatan kelembagaan. Dengan demikian, kelompok perempuan desa dapat mandiri, sejajar dengan kelompok lain, dan terus berkembang untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.4. Narasumber III oleh Ketua KUPS Femung Himet, Desa Long Sam, Bulungan, Kalimantan Utara (Noviana Liling)

2.1.5. Narasumber IV oleh KUPS Perempuan Muara Jaya, Desa Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan (Pitriwati)

Poin-poin:

Pitriwati, Ketua KUPS Perempuan Muara Jaya di Desa Tanjung Agung, Muara Enim, menceritakan perjalanan kelompok perempuan pertama di Sumatera Selatan yang dibentuk pada Januari 2023. Sebelum aktif, dirinya hanya seorang ibu rumah tangga yang sesekali membantu suaminya—Ketua LPHD—dan keterlibatannya sebatas menyajikan kopi bagi tamu. Namun,

melalui pendampingan berbagai pihak termasuk The Asia Foundation (TAF), ia mulai memahami pentingnya perhutanan sosial dan peran perempuan dalam kelembagaan serta pengelolaan hutan.

KUPS Perempuan Muara Jaya berdiri bersama gerakan yang melibatkan 212 perempuan dari 12 KUPS di wilayah Sumsel, dengan delapan anggota inti yang aktif. Kehadiran kelompok ini membuktikan bahwa perempuan mampu berkontribusi dalam pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Sejak berdiri, kelompok mencatat peningkatan ekonomi sebesar 10%, yang tidak hanya bermakna finansial, tetapi juga menjadi bukti nyata kontribusi perempuan terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Kelompok ini juga aktif melakukan monitoring hutan di empat desa melalui tim perempuan pemantau hutan. Dengan pendekatan lembut namun tegas—berbincang, berkunjung, dan berdiskusi (wirangau) dengan masyarakat—mereka segera melaporkan kepada KPH apabila ditemukan indikasi kerusakan seperti longsor atau penebangan liar. Selain berkontribusi dalam konservasi, kelompok menghasilkan produk unggulan berupa kopi “Gwatu” dengan varian rasa original, kayu manis, dan jahe, sebagian hasilnya disisihkan untuk kegiatan kelompok.

Bagi Pitriwati, pengalaman ini juga sarat tantangan, terutama membagi waktu antara keluarga, kelompok, dan hutan. Meski terkadang merasa bersalah pada anak, ia bangga dapat memimpin kelompok, berani belajar, berani berbicara, dan berkomitmen mendukung pendidikan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Transformasi besar yang dirasakan adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam rapat LPHD dan peran aktif mereka sebagai penjaga hutan. Jika dahulu masyarakat hanya merambah, kini telah beralih menjaga hutan berkat kesempatan dan pendampingan yang tepat.

Pitriwati menutup pemaparannya dengan kebanggaan atas dukungan suaminya yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif. Ia menegaskan bahwa perempuan bukan hanya mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga, tetapi juga penjaga kelestarian hutan, sebab apabila hutan terjaga, maka kehidupan masyarakat pun akan ikut terjaga.



Gambar 2.5. Narasumber IV KUPS Perempuan Muara Jaya, Desa Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan (Pitriwati)

2.1.6. Narasumber V oleh Penggagas Perempuan Penjaga Hutan Adat, Mukim Kunyet, Kabupaten Pidie, Aceh (Nurhalimah)

Poin-poin:

Nur Halimah, seorang perempuan kepala keluarga sekaligus petani dari Mukim Kunyet, Kabupaten Pidie, Aceh, memaparkan pengalamannya dalam menginisiasi gerakan perempuan penjaga hutan adat. Wilayah tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan hutan pegunungan yang kaya keanekaragaman hayati, menjadi sumber kehidupan bagi ribuan masyarakat sekaligus habitat penting untuk keberlanjutan ekosistem.

Sejak 2016, Nur Halimah mendapat pendampingan dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) untuk memperjuangkan hak kelola hutan. Upaya tersebut berbuah hasil ketika pada September 2023, masyarakat memperoleh legalitas pengelolaan melalui Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA). Hal ini membuat batas-batas kawasan hutan lebih jelas dan membuka ruang bagi pengelolaan yang berkelanjutan. Sejak saat itu, ia fokus mendampingi perempuan, memperkuat kelembagaan LPHA, dan mengembangkan usaha masyarakat.

Dalam perjalanannya, ia mengikuti berbagai pelatihan seperti kepemimpinan, kesetaraan gender, pengolahan cokelat, serta kerajinan rotan. Ia juga aktif dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 150 hektare, yang melibatkan 115 laki-laki dan 50 perempuan, dengan sistem tumpang sari kakao, kemiri, petai, jengkol, dan pisang.

Atas keyakinan bahwa perempuan memiliki kemampuan menjaga hutan, pada 8 Mei 2025 ia menggagas pembentukan Komunitas Perempuan Penjaga Hutan Desa Kunyet bersama 15 anggota. Kelompok ini lahir dari kesadaran bahwa “setelah mendapat sesuatu, maka harus dijaga.” Namun, tantangan besar datang dari stigma masyarakat yang masih menganggap perempuan hanya pantas bekerja di dapur, tidak layak memegang jabatan, atau tidak mampu membagi peran domestik dan sosial. Menghadapi hal ini, Nur Halimah dan rekan-rekannya saling menguatkan agar terus berjuang.

Ia menegaskan bahwa menjaga hutan adalah kewajiban bersama, dan keterlibatan perempuan akan membuat hasilnya lebih kokoh serta berkelanjutan. Menutup pemaparannya, Nur Halimah menyampaikan harapan agar kelompoknya memperoleh dukungan, pendampingan, dan fasilitas lebih lanjut sehingga perempuan penjaga hutan adat mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar bagi masyarakat maupun kelestarian lingkungan.



Gambar 2.6. Narasumber V Penggagas Perempuan Penjaga Hutan Adat, Mukim Kunyet, Kabupaten Padie, Aceh (Nurhalimah)

2.2. Penyampaian Pendapat oleh Penanggap

2.2.1. Penanggap I oleh Catur Endah Prasetiani (Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial)

Catur Endah Prasetiani memberikan apresiasi dan dukungan kepada para narasumber perempuan yang memiliki komitmen menjaga serta mengelola hutan. Menurutnya, kiprah ini merupakan bagian dari perjuangan kesetaraan gender yang patut dijadikan inspirasi bagi perempuan di wilayah lain. Ia mencontohkan salah satu produk kopi dari KUPS Perempuan Muara Jaya yang dipimpin Ibu Pitriwati, yang sudah dipromosikan hingga ke gubernur Sumatera Selatan dan mendapat sambutan positif karena kualitas dan kemasannya menarik perhatian publik.

Dalam tanggapannya, Ibu Catur juga menyoroti pertanyaan teknis terkait rencana penanaman 5.000 pohon kelapa yang disampaikan kepada Ibu Noviana dari KUPS Femung Himet, apakah penanaman tersebut akan dilakukan di pekarangan rumah warga atau di lahan khusus yang dijadikan kebun kelapa. Hal ini menurutnya penting sebagai bagian dari strategi hilirisasi produk. Ia menjelaskan bahwa praktik serupa telah berlangsung di Kabupaten Bulungan, di mana komoditas seperti cokelat mampu menjadi produk unggulan daerah.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa dalam pengelolaan Perhutanan Sosial (PS), kelompok sering kali harus menunjukkan hasil nyata terlebih dahulu sebelum memperoleh dukungan formal. Dengan demikian, dokumentasi kegiatan kelompok perempuan menjadi sangat penting sebagai bukti keterlibatan mereka. Namun, ia juga menyoroti bahwa dari 11.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Indonesia, hanya 123 yang dipimpin oleh perempuan—angka yang masih sangat rendah dan menjadi catatan penting bagi pembuat kebijakan.

Sebagai penutup, Ibu Catur mendorong pentingnya sinergi lintas sektor melalui kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, maupun akademisi untuk memperkuat kapasitas kelompok perempuan. Ia juga mengusulkan agar rumah produksi yang ada dapat dikembangkan menjadi koperasi sehingga lebih efisien, serta menekankan perlunya jejaring khusus bagi kelompok perempuan untuk memperluas peluang usaha dan memperkuat posisi mereka dalam rantai ekonomi perhutanan sosial.



Gambar 2.7. Tanggapan oleh Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Catur Endah Prasetyani)

2.2.2. Penanggap II oleh Ketua Departemen Manajemen Hutan IPB University (Sony Trison)

Sony Trison menyampaikan apresiasi atas semangat dan kiprah perempuan yang kini berada di garda depan pengelolaan Perhutanan Sosial. Ia menekankan pentingnya aspek sederhana namun sering terabaikan, seperti penggunaan kartu nama atau pertukaran kontak dalam berbagai kesempatan. Menurutnya, hal kecil ini justru dapat menjadi sarana membangun citra diri, memperkuat jejaring, serta membuka peluang kerja sama baru bagi kelompok perempuan.

Ia juga menekankan bahwa networking sangat krusial dalam memperluas relasi dan mengembangkan produk kelompok. Dalam konteks ini, ia mendorong kolaborasi dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bisa memberikan pendampingan maupun inovasi langsung di lapangan.

Lebih lanjut, Sony menyoroti pentingnya branding produk melalui media sosial. Platform digital dianggap sebagai sarana efektif untuk memperkenalkan produk lebih luas, membangun citra, serta menjangkau pasar baru. Ia mengingatkan agar kelompok perempuan memperhatikan prinsip “3K”—Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas. Produk harus memiliki ketahanan yang baik, promosi perlu dilakukan ke berbagai pihak, dan umpan balik dari konsumen harus dioptimalkan untuk mendukung peningkatan pemasaran.



Gambar 2.8. Tanggapan oleh Ketua Departemen Manajemen Hutan IPB University (Soni Trison)

2.2.3. Penanggap III oleh Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Nur Amalia)

Nur Amalia menegaskan bahwa pengelolaan Perhutanan Sosial harus berpegang pada tiga prinsip utama: Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan, dan Kelola Usaha. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam ketiga aspek ini sangat penting. Dalam kelembagaan, perempuan perlu masuk dalam struktur kepengurusan agar dapat berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan. Pada aspek usaha, perempuan memiliki peran besar dalam menghasilkan produk bernilai tambah serta memperkuat pemasaran melalui strategi branding. Ia menekankan bahwa 83% konsumen membeli produk bukan hanya karena kualitas, tetapi karena cara produk tersebut diperkenalkan dan citra penjualnya. Oleh karena itu, pemanfaatan kartu nama maupun media sosial menjadi sarana penting untuk meningkatkan usaha kelompok perempuan.

Pada sisi kawasan, Nur Amalia menyoroti bahwa hutan tidak boleh dikelola sembarangan. Karena itu, perlu ada kelompok penjaga hutan yang memastikan kawasan kelola berjalan sesuai aturan dan kawasan lindung tetap terjaga. Menurutnya, perempuan memiliki perspektif berbeda dengan laki-laki, khususnya dalam memikirkan masa depan anak cucu, sehingga keberadaan mereka dalam menjaga hutan akan memperkuat keberlanjutan.

Melalui ketiga pilar tersebut, ia menutup tanggapannya dengan keyakinan bahwa perempuan mampu memberikan dampak nyata, baik dalam memperkuat pengelolaan hutan lestari maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.9. Tanggapan oleh Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Nur Amalia)

2.3. Sesi Tanya-Jawab

2.3.1. Aldi Hidayah

Poin-poin:

Aldi memberikan saran agar kegiatan perempuan di bidang perhutanan sosial dapat lebih dipromosikan melalui keterlibatan duta wilayah—seperti duta wisata atau duta lingkungan—guna memperluas jejaring. Aldi juga mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana cara menurunkan pengetahuan tradisional kepada anak cucu di tengah derasnya arus globalisasi yang kerap mengikis budaya lokal.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Narasumber 1 (Eliya, LPHD Mahara) menjelaskan bahwa sejak tahun 2003 kelompoknya telah berupaya melakukan edukasi melalui lagu tentang hutan, seperti “Halimun Lestari”, yang diperkenalkan ke masyarakat. Selain itu, anak-anak diajarkan bahwa pohon adalah makhluk hidup, sehingga bila ditebang akan “merasakan sakit” dan dapat menyebabkan bencana banjir. Upaya lain yang dilakukan adalah penanaman 3.000 pohon pada tahun 2004, penanaman massal tahun 2007, serta pembentukan sekolah Minggu untuk mengenalkan hutan, satwa, tanaman obat, dan ekosistem kepada generasi muda. LPHD Mahara juga membangun jalur trekking sepanjang 3 km sebagai sarana edukasi, sekaligus menanamkan nilai kepedulian, seperti tidak mengambil pohon tumbang di kawasan inti dan segera melaporkan indikasi illegal logging.

Sementara itu, Narasumber 4 (Pitriwati, KUPS Perempuan Muara Jaya) menegaskan bahwa nilai menjaga sungai dan hutan telah ditanamkan secara turun-temurun sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di desanya.

Sedangkan Narasumber 5 (Nur Halimah, Perempuan Penjaga Hutan Adat, Aceh) menambahkan bahwa pewarisan kearifan lokal dilakukan dengan cara membawa anak-anak lebih

dekat dengan alam, mengenalkan sungai, buah-buahan lokal, serta makanan tradisional yang melekat dengan budaya dan kehidupan masyarakat.



Gambar 2.10. Tanya Jawab bersama Peserta (Aldi Hidayah)

2.3.2. Nuan

Poin-poin:

Dalam sesi diskusi, Nuan mengkritisi kebijakan pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir yang dinilai turut merusak hutan akibat ekspansi tambang dan perkebunan sawit. Ia kemudian mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana gerakan perempuan dapat menyikapi kerusakan tersebut

Menanggapi hal ini, para narasumber secara umum menyampaikan bahwa menjaga hutan adalah kewajiban bersama seluruh masyarakat. Perempuan memiliki peran penting dalam pelestarian karena cara pandang mereka selalu berorientasi pada masa depan anak cucu. Upaya yang dilakukan kelompok perempuan meliputi rehabilitasi hutan, pengembangan usaha berbasis hasil hutan, serta penguatan kelembagaan perempuan penjaga hutan. Melalui langkah kolektif tersebut, gerakan perempuan diyakini dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi tekanan kerusakan hutan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.



Gambar 2.11. Tanya Jawab bersama Peserta (Nuan)

2.3.3. Siti

Poin-poin:

Salah satu peserta menanyakan bagaimana para narasumber membagi waktu antara kegiatan domestik sebagai ibu rumah tangga dengan aktivitas kelompok usaha (KUPS) maupun menjaga hutan.

Narasumber 2 (Hasma, KUPS Kopi Baredok) menjelaskan bahwa ia mengatur jadwal secara terstruktur, misalnya rapat kelompok pada pukul 14.00–16.00 lalu menyiapkan makan malam pada pukul 16.00–18.00.

Narasumber 3 (Noviana Liling, KUPS Femung Himet) menambahkan bahwa setiap orang memiliki cara masing-masing, namun koordinasi dan kesepakatan melalui grup WhatsApp menjadi kunci agar kegiatan lebih efektif.

Narasumber 4 (Pitriwati, KUPS Perempuan Muara Jaya) menyampaikan bahwa kelompoknya menetapkan jadwal rutin, seperti menggabungkan arisan dengan rapat bulanan, serta mengajak anggota sejak jauh hari agar kegiatan tidak membebani.

Sementara itu, Narasumber 5 (Nur Halimah, Perempuan Penjaga Hutan Adat) menuturkan bahwa dirinya lebih mudah membagi waktu karena berstatus single parent dengan anak-anak yang sudah dewasa.



Gambar 2.12. Tanya Jawab bersama Peserta (Siti)

2.3.4. Harapan dari Narasumber

Narasumber 1 (Eliya, LPHD Mahara): Menginginkan adanya sinergi hulu–hilir dalam pengelolaan hutan. Harapannya, lahan terbuka dapat dihijaukan kembali, masyarakat sekitar semakin maju, dan hasil hutan berupa buah-buahan dapat menjadi komoditas unggulan.

Narasumber 2 (Hasmah, KUPS Kopi Baredok): Mengharapkan keterbukaan dan kesetaraan dalam kelompok perempuan penjaga hutan, serta mempererat silaturahmi. Ia ingin perempuan semakin aktif, mampu membagi waktu, dan mendapat dukungan agar produk kelompok dapat menembus pasar ekspor.

Narasumber 3 (Noviana Liling, KUPS Femung Himet): Menyampaikan rasa lega bisa hadir pertama kali di Jakarta. Ia berharap dukungan pemerintah agar produk kelompok perempuan tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mampu menembus pasar internasional.

Narasumber 4 (Pitriwati, KUPS Perempuan Muara Jaya): Berharap adanya pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah maupun pihak terkait, serta peluang untuk mengembangkan produk hingga pasar ekspor.

Narasumber 5 (Nur Halimah, Perempuan Penjaga Hutan Adat): Bersyukur dapat hadir bersama tokoh-tokoh hebat. Ia menyampaikan tekad dan semangat yang kuat, serta berharap adanya bimbingan terus-menerus agar komunitas perempuan penjaga hutan semakin maju dan berdaya.

BAB 3

KESIMPULAN DAN PENUTUP

3.1. Kesimpulan

3.1.1. Peran Perempuan

- Perempuan berperan aktif dalam pengelolaan hutan, baik pada aspek konservasi, pengelolaan kelembagaan, maupun pengembangan usaha berbasis hasil hutan.
- Kisah narasumber menunjukkan transformasi dari peran domestik menjadi pemimpin kelompok dan penggerak ekonomi.

3.1.2. Tantangan Utama

- Mindset masyarakat yang masih menganggap tabu bagi perempuan terlibat aktif dalam pengelolaan hutan.
- Keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan akses perempuan dalam administrasi, keuangan, serta pengelolaan produk.
- Beban ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus anggota atau pimpinan kelompok.

3.1.3. Dukungan & Pendampingan

- LSM (seperti TAF, JKMA, Pionir) berperan penting dalam mendampingi penguatan kelembagaan, pengelolaan administrasi, keuangan, serta pengembangan produk dengan perspektif gender.
- Pemerintah daerah dan desa turut mendukung melalui bantuan peralatan, sertifikasi halal/PIRT, hingga program penanaman ribuan pohon.

3.1.4. Cerita Keberhasilan

- Produk unggulan seperti kopi, VCO, anyaman rotan, dan produk olahan hutan lainnya berhasil dipasarkan hingga tingkat nasional.
- Kelompok perempuan terlibat dalam monitoring hutan, melaporkan kerusakan atau penebangan liar, serta menjaga kawasan lindung.
- Peningkatan ekonomi keluarga terbukti nyata, bahkan mampu membiayai pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi.

3.1.5. Pembelajaran Kunci

- Branding dan jejaring (networking) sangat penting: kartu nama, media sosial, hingga dukungan akademisi membantu memperkuat pemasaran produk.
- Tiga prinsip pengelolaan Perhutanan Sosial (3K): Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan, dan Kelola Usaha menjadi pedoman utama.

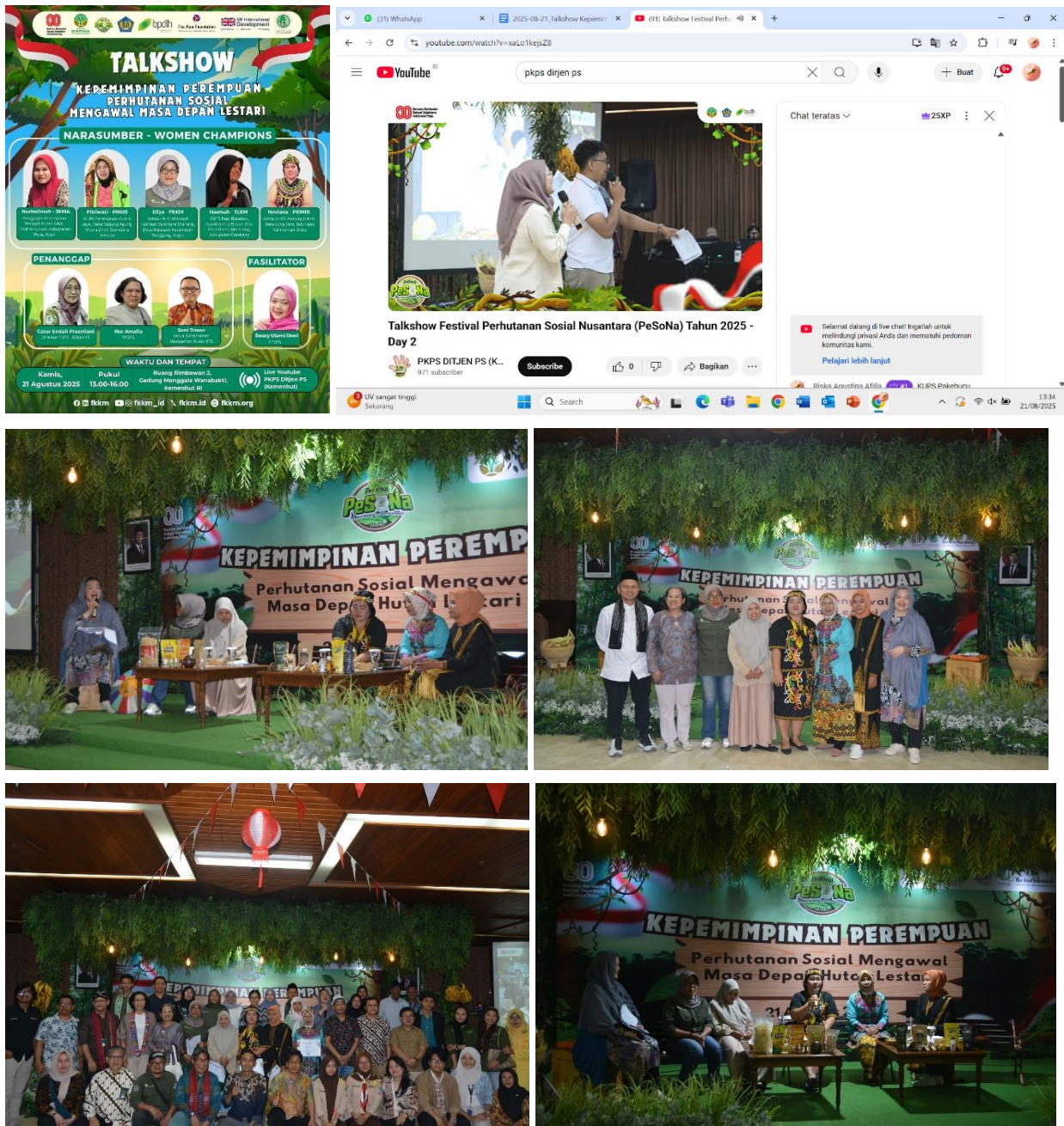
- Nilai kearifan lokal (seperti pembagian hutan tradisional Sunda dan tradisi lisan) terbukti memperkuat kesadaran konservasi lintas generasi.

3.2. Penutup

Talkshow ini menegaskan komitmen bersama lintas sektor dalam memperkuat kepemimpinan perempuan dalam perhutanan sosial. Kolaborasi nyata dan dukungan berkelanjutan menjadi kunci bagi terwujudnya hutan yang lestari, masyarakat yang sejahtera, dan keadilan sosial-ekologis di Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi *Talkshow*



Lampiran 2 Daftar Hadir *Talkshow*

Daftar hadir luring dari kegiatan *talkshow* ini dapat diakses melalui [tautan ini](#) atau juga bisa diakses melalui kode QR berikut.



Lampiran 3 Tayangan Ulang *Talkshow*

Tayangan ulang *talkshow* dapat dilihat di kanal Youtube PKPS Ditjen PS (KEMENHUT) atau melalui [tautan ini](#)

Lampiran 4 Publikasi Media



Liputan media mengenai rangkaian *Talkshow Kepemimpinan Perempuan Perhutanan Sosial Mengawal Masa Depan Hutan Lestari* dapat diakses melalui beberapa media sebagai berikut:

- [Jakarta Post Net Work](#)
- [Berita Indonesia Traz News](#)
- [62Post-Festival Pesona 2025](#)
- [Actual News](#)
- [Detik Pagi.com](#)
- [Pikiran Merdeka](#)
- [Indonesia Times](#)